

KEPENTINGAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PAJAK ACTION FIGURE IMPOR YANG DITERAPKAN DI INDONESIA

Gilang Wilmantara¹

Abstract

This study aims to analyze and describe the interests of Indonesian Government had on international economic, in this case that of action figures imported from overseas. based from the points of policies made by the government that manages on interntional economics that consisted of International trading, managing export and import also as being a member of the World Trade Organization. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The concepts used are Protectionism. The results of this study shows that the interests of Indonesian Government had on the making of its international trade policies are that of economic interests, whereas for the policies are made on the notion that of to improve the countries income as well as put forward the competitive edge of the products from Indonesian companies. Aside from that, the government also promotes the citizen to decrease the usages of import products. From the government itselfs, the policies made from its interests are reflected from the 2 main interests which was discussed in this research. The interests are the Economic Interests, and Protection Interests.

Keywords: *Interests, Economic, Export and Import, Policy, Action Figures*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu anggota Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization) tentunya melakukan berbagai macam impor. baik produk jadi maupun produk tidak jadi. produk jadi yang terdiri dari makanan, alat kosmetik, alat elektronik dan sebagainya, sementara produk tidak jadi seperti karet dan besi/baja. Begitu juga dengan mainan atau disebut juga action figure yang merupakan salah satu produk tersier yang diimpor oleh Indonesia. Sejak dekade 2000 sampai dengan 2010, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor action figure terbesar dengan banyaknya organisasi action figure yang ada di Indonesia. Salah satu organisasi komunitas kolektor action figure terbesar dan pertama di Indonesia adalah KAFI (Komunitas Action Figure Indonesia) yang dibentuk pada tahun 2006. Tidak mengherankan jika melihat banyak kolektor action figure yang berani untuk mengeluarkan uang sampai puluhan juta rupiah untuk mendapatkan action figure yang disukainya.

Pada tahun 1990an, berbagai jenis action figure masuk ke Indonesia, namun pada saat itu, komunitas kolektor maupun istilah action figure belum ada di Indonesia, dan masyarakat menganggap action figure hanyalah sejenis mainan untuk anak laki-laki. Kemudian pada tahun 2006 dibuat komunitas action figure pertama yang ada di Indonesia, yaitu KAFI (Komunitas Action Figure Indonesia). KAFI adalah komunitas action figure pertama di Indonesia, yang berpusat di Jakarta. Dengan kepopuleran action figure yang meningkat, semakin banyak juga komunitas-komunitas kolektor action figure yang dibentuk di kota-kota lain di seluruh Indonesia

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : wilmantaragilang@gmail.com

KAFI juga bertindak sebagai payung organisasi grup-grup kolektor action figure dari kota lain di seluruh Indonesia. Sehingga fenomena action figure yang pada awalnya hanya sebatas kolektor individu atau kota, meluas menjadi sebuah organisasi kolektor action figure seluruh Indonesia. Pangsa pasar action figure juga meluas dari toko ritel dan toko mainan juga mencakup kegiatan jual-beli antara sesama anggota komunitas action figure. Kegiatan impor juga meningkat dengan banyaknya kolektor dan penjual mengimpor sendiri mainan-mainan mereka.

Meskipun dianggap sebagai mainan, tetapi action figure memiliki nilai seni dengan sendirinya yang ditujukan untuk kolektor-kolektor dewasa. ([detik.com, 2019](#)) Meskipun begitu, sampai dengan tahun 2015, kebanyakan action figure yang masuk ke Indonesia diimpor oleh importir swasta yang tidak memberikan keuntungan yang signifikan terhadap pendapatan ekonomi negara.

Kegiatan pangsa pasar action figure hanya terjadi antara importir, distributor, seller dan kolektor, ditambah dengan masuknya action figure impor yang tidak memiliki klasifikasi barang khusus dalam jumlah banyak sehingga tidak memberikan pemasukan yang signifikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak impor, karena seluruh kegiatan ekonomi terjadi dalam pangsa pasar action figure yang bersifat swasta. Kegiatan pangsa pasar yang terjadi secara swasta inilah yang membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur kegiatan impor mainan.

Nilai barang impor action figure tersebut membuat pemerintah Indonesia segera membuat kebijakan-kebijakan impor yang bertujuan untuk menekan pemasukan barang-barang impor serta mendapatkan pemasukan devisa melalui pajak barang impor yang masuk ke Indonesia. Pemerintah membuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 37/M-DAG/PER/9/2008 dan pemberlakuan wajib adanya Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin yang digunakan untuk menjamin pemulihan kerugian yang dialami industri dalam negeri apabila terjadi kenaikan impor dari stock barang yang sama yang dibuat oleh perusahaan tersebut.

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani membentuk satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang terdiri dari Dirjen Bea cukai, POLRI, TNI untuk menghentikan kegiatan impor borongan. Impor borongan disini maksudnya adalah kegiatan importir swasta yang melakukan impor bersama-sama, kemudian mengatasnamakan importir tersebut sebagai pengimpor swasta lainnya. ([tempo.com, 2019](#)). Kebijakan yang dibuat berhasil mengurangi kegiatan impor borongan yang dilakukan oleh importir-importir swasta, tetapi kebijakan tersebut juga membuat sebagian besar action figure yang diimport langsung tanpa importir oleh seller/dropshipper dan konsumen tidak bisa masuk ke Indonesia dengan alasan biaya pemasukan dan pajak barang yang sangat mahal

Dengan kebijakan tersebut, kasa impor melalui laut mengalami kenaikan harga menjadi Rp.4-5 Juta/m³. Dengan kebijakan kenaikan pajak tersebut, Indonesia mendapatkan sekitar Rp.80-90 Juta untuk setiap barang impor yang masuk Pemasukan tersebut merupakan gabungan biaya dari Bea masuk, Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi pemasukan barang impor adalah kebijakan Red Line yang isinya mengatakan barang akan dikembalikan ke negara asalnya apabila deskripsi di airwaybill dan isi paket tidak sesuai, Under Value atau memberikan nilai jual barang lebih rendah dibandingkan dengan nilai komersial barang yang sebenarnya, barang impor yang dilarang masuk ke Indonesia, serta pembuatan kuota barang impor yang dipesan oleh swasta. Baik oleh seller, maupun konsumen. Barang impor tersebut boleh masuk

Indonesia dengan dokumentasi atau rekomendasi dari departemen terkait yang dapat memberikan izin pemasukan barang.

Selain kebijakan Pajak Impor dan Red Line, Pemerintah juga membuat kewajiban uji coba SNI untuk mainan-mainan yang masuk ke Indonesia. Harga uji coba SNI yang mahal membuat importir yang bisa menguji barang-barang impornya hanya bisa dilakukan oleh toko-toko besar yang terdaftar di pemerintahan. Sementara konsumen dan importir swasta harus menaikkan harga jual barangnya dalam negeri agar tidak mengalami kerugian dikarenakan kewajiban membayar uji coba SNI yang sebesar Rp. 8 juta rupiah/uji. Kasus yang viral pada bulan Januari tahun 2018 lalu, seorang pembeli dipaksa menghancurkan mainan import yang dibawa dari luar negeri dikarenakan mainan tersebut tidak melewati uji coba SNI di kantor Bea Cukai. (tempo.com, 2018)

Untuk menjalankan kepentingan ekonomi negara, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah Kebijakan Kuota dan Tarif, Kebijakan Subsidi Ekspor, Kebijakan Investasi, dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur. 4 kebijakan ini menjadi 4 kebijakan utama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan kepentingan ekonominya.

Kerangka Teori dan Konseptual Teori Proteksionisme

Drs. Sumadji mengatakan proteksionisme suatu negara muncul sebagai upaya suatu negara untuk melindungi kepentingan di dalam negerinya. Dalam hal ini, tindakan proteksi ini berfokus pada posisi ekonomi suatu negara dalam hubungan internasional ([Sumadji, 2006](#)).

Pada dasarnya, untuk menjaga atau memproteksi suatu negara terhadap akibat buruk dari interaksi ekonomi internasional ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, negara dapat mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti kebijakan pajak, tata cara niaga, bea cukai, tarif masuk, serta pembatasan kuota. Karenanya, proteksionisme juga diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebutuhan atau kepentingan nasional.

Pada dasarnya, untuk menjaga atau memproteksi suatu negara terhadap akibat buruk dari interaksi ekonomi internasional ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, negara dapat mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti kebijakan pajak, tata cara niaga, bea cukai, tarif masuk, serta pembatasan kuota. Karenanya, proteksionisme juga diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebutuhan atau kepentingan nasional. ([Levi, 1997](#)).

Kebijakan pajak impor berorientasi terhadap anti-globalisasi dan perdagangan bebas dimana pemerintah membatasi bahkan malarang produk dalam negeri diekspor dan produk luar negeri masuk ke dalam negeri. Semua barang cenderung diproduksi dan digunakan didalam negeri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif-Analitik dengan memaparkan lebih dalam tentang bagaimana hambatan action figure dan barang impor lain masuk ke dalam negeri.. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder dikarenakan data-data yang diperoleh bersumber dari depth interview penulis dengan importir-importir dan distributor Action

figure yang di Indonesia, serta buku-buku, bahan-bahan internet dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dan dianggap berguna dan saling berkaitan. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah metode Kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang berangkat dari hal yang umum dan memiliki kawasan yang luas menuju hal yang bersifat khusus dan spesifik, layaknya piramida terbalik.

Hasil dan Pembahasan

Kepentingan Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Pembuatan Kebijakan

Kepentingan ekonomi dan kesejahteraan perusahaan dalam negeri menjadi tujuan utama pemerintah Indonesia dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang mengatur perekonomian internasional Indonesia. Dengan mengedepankan keuntungan (profit) yang didapat dari secara domestik maupun internasional melalui berbagai macam pangsa pasar internasional. Kepentingan ekonomi pemerintah Indonesia dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan Indonesia dalam Pertumbuhan Ekonomi negara dengan pembuatan kebijakan ekspor-impor serta kebijakan-kebijakan lain yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara.

Kepentingan Ekonomi Pemerintah

1. Menaikkan Pendapatan/Devisa Negara

Indonesia melakukan kegiatan ekonomi bersama dengan negara-negara anggota organisasi perdagangan dunia. Selain untuk memenuhi kebutuhan negara lain dan negara sendiri, Tetapi juga untuk menaikkan devisa negara. Tujuan dari kenaikan devisa negara adalah terjadinya Pertumbuhan Ekonomi, Menjaga stabilitas harga barang yang di ekspor, serta memastikan Eksistensi Tenaga kerja serta lapangan pekerjaan.

2. Memenuhi Kebutuhan di Negara Lain

Sebagai negara yang mengimpor barang dari negara lain, Indonesia juga turut melakukan ekspor yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, namun tidak di produksi di negara sendiri. Kegiatan ekspor-impor sendiri sangat menguntungkan negara-negara yang terikat dalam kerjasama ekonomi itu sendiri. Tujuan dari Indonesia melakukan ekspor-impor adalah:

- a. Untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa.
- b. Untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.
- c. Untuk melakukan penetrasi ekonomi atau membuka pasar baru di negara lain.
- d. Untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global.
- e. Untuk mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri.
- f. Untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri.

Kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekspor suatu negara maka minat investasi dan pertumbuhan ekonominya juga semakin baik. Ada banyak manfaat yang didapatkan suatu negara dari melakukan kegiatan ekspor-impor. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Memperluas pasar produk lokal.

- b. Menambah devisa negara.
- c. Membuka lapangan pekerjaan.

3. Memperoleh Keuntungan Eksternal dan Internal

Tujuan kegiatan perdagangan internasional adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang dicari adalah keuntungan internal dan keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri yang didapat melalui banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan. Keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan alat-alat produksi maupun untuk penambahan fasilitas yang dibutuhkan dalam perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produksi.

Sementara Keuntungan Eksternal, disebut juga Keuntungan Spesialisasi, yaitu keuntungan yang didapat dari meningkatkan keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi. Contoh keuntungan spesialisasi adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional akibat adanya kelebihan dari kemampuan sumber daya negaranya yang menyebabkan negara tersebut lebih efisien dalam menghasilkan suatu produk tertentu.

4. Memperluas Pasar

Untuk menghindari terjadinya kelebihan produksi suatu barang, terkadang perusahaan tidak akan menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) secara maksimal karena akan membuat barang produksi yang dihasilkan berlebihan, sehingga mengakibatkan harga produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut turun. Maka dari itu, kegiatan ekspor-impor bertujuan agar perusahaan menjalankan alat produksinya secara maksimal tanpa khawatir akan terjadinya kelebihan produk, karena kelebihan produk tersebut dapat dijual keluar negeri. Hal ini juga membuat lebih banyak pasar yang akan menjual produk tersebut di negara lain.

5. Transfer Teknologi Modern

Negara tidak hanya akan memperoleh keuntungan dalam hal materi saja, keuntungan lain yang didapat ada dalam proses transfer teknologi modern. Dengan berkembangnya zaman maka negara maju akan memberikan inovasi baru dengan menciptakan regenerasi teknologi yang lama dengan teknologi yang baru untuk menambah keefektifan dan keefisienan dalam proses produksi oleh suatu perusahaan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara dapat mempelajari dan mengaplikasikan teknologi yang sudah digunakan oleh rekan kerjasamanya untuk mengoptimalkan teknologi perusahaan yang ada di negaranya.

Kepentingan Proteksi

Kepentingan lain yang dijalankan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah Kepentingan Proteksi. Proteksionisme adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melindungi industri dalam negeri melalui tarif dan kuota. Kebijakan Trade protection atau proteksi perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan perdagangan. Tujuan dibuatnya kebijakan proteksi adalah untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran suatu Negara. Neraca Pembayaran adalah catatan yang berisi penerimaan dari luar negeri maupun pembayaran ke luar negeri, memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara produk-produk tradisional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika suatu negara

hanya menggantungkan diri pada satu produk komoditi andalan, terakhir untuk menjaga stabilitas nasional, agar negara tidak menggantungkan diri pada negara lain.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga perekonomian negara baik secara domestik maupun internasional melalui berbagai macam pangsa pasar. Meskipun hingga saat penulisan ini Indonesia belum membuka pangsa pasar entertainment yang mengenai tentang hobbies and collectibles (Hobi dan barang koleksi), namun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lumayan cepat di era global terbukti mampu untuk bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Kepentingan Pemerintah Indonesia untuk melindungi pangsa pasar mainan di Indonesia terdiri dari beberapa kepentingan ekonomi yang terdiri dari kepentingan pembangunan, kepentingan daya saing, dan kepentingan proteksi.

Kepentingan pembangunan ekonomi terlihat dari bagaimana Indonesia mengedepankan investasi untuk pembangunan-pembangunan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kepentingan daya saing pasar Indonesia terdiri dari kebijakan-kebijakan yang dapat membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk bisa bersaing dalam pangsa pasar internasional. Sementara dalam kepentingan proteksi, pembuatan kebijakan proteksi Indonesia mengambil langkah pembatasan administratif dan pemberlakuan kebijakan tarif dan kuota impor.

Dilihat dari kepentingan-kepentingan pemerintah Indonesia, tujuan dari kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator seperti berkurangnya kesenjangan sosial dan kemiskinan, bertambahnya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Levi, Margaret. 1997. *Consent, Dissent, and Patriotism (Political Economy of Institution and Decision)*. America : Cambridge University Press.
- Sumardji P. 2006. *Kamus Ekonomi*. Depok : Wacana Intelektual
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia*. Pasal 1. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pelarangan mainan non-SNI dan video pembeli merusak mainan impor di Kantor Bea Cukai Indonesia. Tersedia di <https://bisnis.tempo.co/read/1052564/kesal-dengan-bea-cukai-video-pria-rusak-mainanini-jadi-viral>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.
- Pengertian action figure dan Grup pecinta action figure yang ada di Indonesia. Tersedia di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4183318/mengenal-lebih-dekat-seluk-beluk-action-figure-dan-pencintanya>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2019
- Peraturan Pemerintah dalam Kegiatan Impor Beresiko Tinggi. Tersedia di [Penertiban-Impor-Berisiko-Tinggi.https://nasional.tempo.co/read/1026008/pibt-tingkatkan-kepatuhan-importir](https://nasional.tempo.co/read/1026008/pibt-tingkatkan-kepatuhan-importir). Diakses pada tanggal 27 Januari 2019